

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49%) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
3. Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
4. Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar. 4.1
Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan.

4.1.2 Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki visi yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera"

Didalam visi pembangunan tersebut, sesungguhnya terkandung makna filosofis yang sangat mendasar, yang tersirat didalam lima kata kunci, yaitu :

1. Kata "**Masyarakat NTB**" artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Kata "**Beriman**" berarti masyarakat yang agamis, atau religius, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berahlak mulia dan saling menghargai satu sama lain;
3. Kata "**Berbudaya**" artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
4. Kata "**Berdayasaing**" artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global;
5. Kata "**Sejahtera**" artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat diwujudkan melalui 7

Misi pembangunan, yakni:

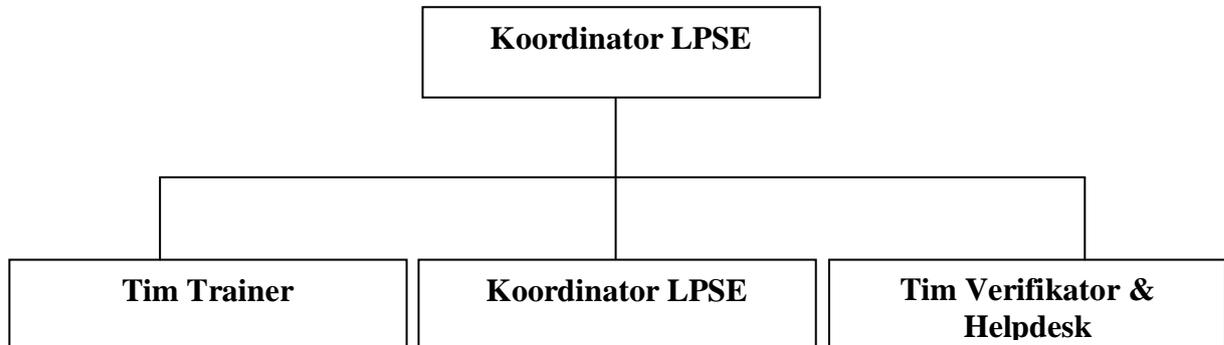
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter;
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan;
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah;
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang;
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4.2 Deskripsi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.1 Struktur, Fungsi dan Tugas Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Barat

LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam *website* LPSE NTB <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc/> sebagai berikut:

Gambar.4.2
Struktur Organisasi LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc/>: 2016

Secara umum fungsi LPSE Provinsi NTB adalah:

1. Mengelola sistem *e-procurement*,
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang dan jasa,
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan penyedia barang/jasa,
4. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem *e-procurement* kepada PPK/Panitia dan penyedia barang dan jasa,
5. Melakukan Pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan penyedia barang dan jasa.

Untuk menjalankan fungsi tersebut maka setiap struktur di LPSE Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, tentunya yang akan mendukung fungsi LPSE Provinsi NTB secara umum. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja (*Working Group*) Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Barat

maka dijelaskan masing-masing tugas pokok dan fungsi jabatan dari struktur LPSE Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Koordinator yang terbagi dua yaitu Ketua dan Sekretaris dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

A. Ketua mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE,
- 2) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional harian LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat,
- 3) Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada penanggungjawab LPSE dan kepada Kepala Daerah.

B. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait,
- 2) Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE,
- 3) Pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya,
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dijalankan oleh Unit Administrasi Sistem elektronik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik,
 - 2) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan,
 - 3) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan,
 - 4) Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis di LPSE,
 - 5) Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
3. Tim Verifikator dan Helpdesk yang terdiri dari Unit Registrasi dan Verifikasi, Unit Layanan dan Dukungan (*Helpdesk*) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
- A. Unit Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Memiliki tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik,
 - 2) Pelayanan pendaftaran pengguna sistem pengadaan secara elektronik,
 - 3) Penyampaian informasi kepada calon pengguna sistem pengadaan secara elektronik tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan,
 - 4) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna sistem pengadaan secara elektronik,
 - 5) Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna sistem pengadaan secara

elektronik.

- 6) Berhak menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE
- 7) Dapat menonaktifkan *User ID* dan *password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pengguna SPSE dan permintaan PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

B. Unit Layanan dan Dukungan (*Helpdesk*) mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Melaksanakan pelayanan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan membantu verifikator dalam menjalankan fungsinya *offline*,
- 2) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik,
- 3) Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE,
- 4) Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE,
- 5) Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna sistem pengadaan secara elektronik.

4. Tim Instruktur Aplikasi SPSE (*Trainer*) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) *Contact Person* untuk aspek-aspek pelatihan,
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi pengguna SPSE,
- 3) Menyiapkan materi serta memfasilitasi pelatihan,
- 4) Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan pengadaan pemerintah secara elektronik.

Adapun nama-nama yang menduduki jabatan pada struktur di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Nama-Nama Pejabat yang Menduduki Struktur LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA	JABATAN
1	Mahmud	Ketua LPSE Provinsi NTB
2	I made putu kusuma wijaya	Sekretaris/Merangkap Trainer
3	L. Hilman Iswarta	Pelaksana LPSE
4	Ida Made Wira Adnyana	Pelaksana LPSE
5	Muhammad Aliwardana, ST	Admin PPE
6	Roy Prabantoro, S. Kom	Registrasi dan Verifikasi
7	I Made Merta Wijaya, SH	Registrasi dan Verifikasi
8	Muhammad aliwardana, ST	Koordinator Administrasi Sistem Elektronik
9	Roy Prabantoro	Verifikator LPSE
10	SOPHIA ADELINE	Staff LPSE
11	Wira	Staff LPSE

Sumber: *Data LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat: 2016*

4.2.3 Website LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat

LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan *launching* pertama kali *website e-procurement* pada 16 September 2011, dengan alamat situs <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc/>. Para penyedia barang dan jasa atau masyarakat luas dapat melihat secara jelas *website* ini di situs internet dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar. 4.3
Website LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undangan

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan / Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.

Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas. Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.

e-Procurement
LELANG SECARA ELEKTRONIK

No	Nama Paket	Instansi	HPS	Tanggal Download
1	pembangunan dam pengendali pada wilayah BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	456,93 jt	11 Aug - 20 Aug 2017
2	pembangunan dam pengendali pada wilayah BKPH Ropang	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	228,47 jt	11 Aug - 20 Aug 2017
3	Review Desain Bangunan Gedung Pendidikan Komplek Islamic Center (IC)	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	200 jt	9 Aug - 17 Aug 2017
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Lombok Timur	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	5 M	8 Aug - 15 Aug 2017
5	penataan pelabuhan pariwisata tanjung luar	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	569,5 jt	8 Aug - 17 Aug 2017
6	pengadaan bangunan gedung dan bangunan kantor KPH ropang	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	413,42 jt	2 Aug - 13 Aug 2017
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan - Pengadaan Jalan Desa - Biaya Pembentukan Badan Jalan Desa di Gili Air	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	490,26 jt	4 Aug - 14 Aug 2017

Sumber: <https://lpse.ntbprov.go.id/eproc/>: 2016

Adapun proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online melalui *website* tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman lelang oleh Panitia,
2. Upload dokumen lelang oleh Panitia,
3. Download dokumen lelang oleh Penyedia,
4. Penjelasan lelang,
5. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia,

6. Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia,
7. Evaluasi Pemenang,
8. Sanggahan kepada PPK.

4.3 Deskripsi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa (Vendor) Nusa Tenggara Barat

4.3.1. Kualifikasi Perusahaan Penyedia Barang Dan Jasa

Kualifikasi perusahaan adalah pengelolaan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.

Berdasarkan Peraturan No.10 tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, Penggolongan kualifikasi perusahaan ini dapat dibagi menjadi 8 jenjang kompetensi, yaitu :

1. Perseorangan mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 300 jt.
2. Kecil 1 (K1) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 1 Miliar
3. Kecil 2 (K2) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 1.75 Miliar
4. Kecil 3 (K3) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 2.5 Miliar
5. Menengah (M1) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 10 Miliar
6. Menegah 2 (M2) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 50 Miliar
7. Besar (B1) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d 250 Miliar
8. Besar (B2) mempunyai batas nilai satu pekerjaan 0 s.d tidak terbatas

4.3.2. Perusahaan Konstruksi Di Nusa Tenggara Barat

Jumlah perusahaan/Usaha konstruksi di Nusa Tenggara Barat yang terdapat dalam kerangka Sampel (Sampling Frame) Survei Perusahaan/Usaha Konstruksi oleh BPS NTB tahun 2015 adalah sebesar 15.813 perusahaan/usaha. Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi kurang dari 1.000 perusahaan ada sebanyak 5 Kabupaten/Kota yaitu Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Sedangkan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi antara 1.000 hingga 3.000 adalah Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa dan Bima. Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi paling sedikit adalah Kota Bima sebesar 491 perusahaan. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi paling banyak masing masing 3.360 dan 3.885 perusahaan/usaha.

Tabel. 4.2
Jumlah Perusahaan/Usaha Konstruksi Menurut Skala Usaha

Kabupaten/Kota	Perorangan	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
Lombok Barat	3.179	169	11	1	3.360
Lombok Tengah	3.573	298	14	-	3.885
Lombok Timur	2.479	210	14	-	2.701
Sumbawa	1.102	340	12	-	1.451
Dompu	715	204	5	3	927
Bima	924	118	3	-	1.045
Sumbawa Barat	256	156	32	-	444
Lombok Utara	500	17	-	-	517
Kota Mataram	578	344	68	2	992
Kota Bima	140	343	8	-	491
Total	13.446	2.199	161	7	15.813

Sumber : Direktorat Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Ditinjau dari skala usahanya, perusahaan/usaha konstruksi di Nusa Tenggara Barat mayoritas berskala Perorangan yaitu sebesar 85,03% dengan jumlah 13.446 usaha dan skala kecil sebesar 13,91% atau 2.199 perusahaan. Sedangkan yang paling sedikit adalah perusahaan menengah dan besar masing masing hanya 1,02% (161 perusahaan) dan 0,04% (7 perusahaan).

Dilihat dari Bentuk Badan Usahanya, Perusahaan/usaha konstruksi di Nusa Tenggara Barat sebagian besar berbadan usaha perseorangan yaitu sebesar 85,03%, selanjutnya berbentuk CV sebesar 13,73%, PT/Persero sebesar 1,07%, Firma sebesar 0,14% dan lainnya 0,04%

Tabel. 4.3
Jumlah Perusahaan/Usaha Konstruksi Menurut Badan Usaha

Kabupaten/Kota	Perorangan	CV	PT/ PT Persero	Firma	Lainnya	Jumlah
Lombok Barat	3.179	169	12	1	-	3.360
Lombok Tengah	3.573	298	14	-	-	3.885
Lombok Timur	2.479	203	12	-	4	2.701
Sumbawa	1.102	337	9	-	-	1.451
Dompu	715	194	8	3	1	927
Bima	924	114	3	9	-	1.045
Sumbawa Barat	256	154	32	4	1	444
Lombok Utara	500	17	-	1	-	517
Kota Mataram	578	343	70	1	-	992
Kota Bima	140	342	8	1	-	491
Total	13.446	2.171	168	22	6	15.813

Sumber : Direktorat Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015